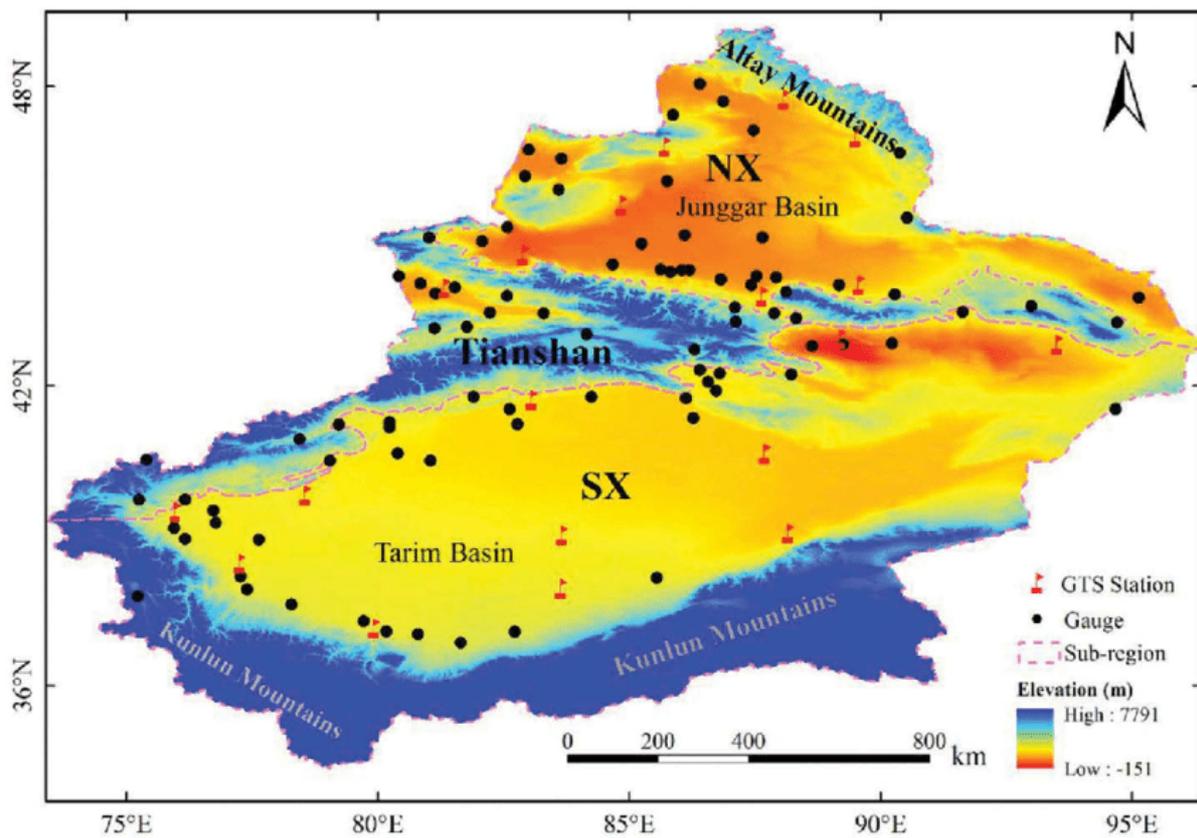


## Bab II

### Sejarah dan Dinamika Konflik Uyghur

Wilayah Xinjiang memiliki luas wilayah 1.660.000 kilometer persegi dengan Urumqi sebagai ibu kotanya. Xinjiang memiliki dua kota , lima daerah administrasi, dan 88 Kabupaten. (Bank, 2014; Tang, n.d.) Menurut Dolkun Kamberi, PH. D didalam bukunya berjudul “Uyghur and Uyghur Identity’, wilayah Uyghur meliputi “Tiga gunung cengkraman dan tiga cekungan”. Pegunungan Tängri membagi Cekungan Yarish di utara dan Cekungan Tarim di selatan. Di tengah cekungan Tarim terletak gurun Täklimakanian seluas 0,32 juta kilometer persegi. (Dolkun Kamberi, 2015)

Gambar 1. Peta Wilayah Xinjiang



Sumber : (Tang, n.d.)

di akses tanggal 1 april 2021

Wilayah XUAR berada di perbatasan Asia Tengah, dengan jumlah penduduk yang relatif kecil, yaitu sekitar 1,9 juta penduduk. Sebelum adanya revolusi ekonomi dari pemerintah Tiongkok, penduduk disini hidup layaknya masyarakat pedesaan. Menurut M. Rayila , wilayah

ini berada dalam Turkestan Timur China Barat yang jauh, yang mengkaitkan dua negara yang merdeka pada abad ke-20 yaitu, *Turkish-Islamic Republic of Eastern Turkestan* ditahun 1930-an dan ETR (*East Turkestan Republic*) di tahun 1940-an (Rayila)

Pada pembahasan selanjutnya, akan membahas bagaimana proses penyebaran agama islam di wilayah Tiongkok , dimana hal ini merupakan cikal bakal berkembang konflik diskriminasi etnis Uyghur. Identitas murni Uyghur adalah Islam yang berada diwilayah yurisdiksi Tiongkok saat ini.

## **2.1 Pembahasan Singkat Sejarah Islam Masuk ke Wilayah Tiongkok**

Tiongkok terkenal atas warisan budaya peradaban mereka yang sangat besar untuk bidang ekonomi kala itu, yaitu jalur sutranya. Hal ini juga yang menjadi salah satu faktor gelombang besar penyebaran Islam di Kawasan Asia Tengah. Menurut antropolog H. Ibrahim Tien Ying Ma, didalam bukunya “Perkembangan Islam di Tiongkok” , yaitu hubungan jalur pelayaran antara etnis Tiongkok dan wilayah Arab Saudi saat ini, telah ada sejak Abad ke-5 Masehi (Ma, 1979). Didalam periodisasi tersebut, Islam belum lahir. Dapat disimpulkan bahwa jalur perdagangan Tiongkok dan Arab sudah ada sebelum lahirnya Agama Islam di Arab Saudi.

Berdagang memang telah terbukti menjadi faktor yang cukup kuat dalam kontribusi penyebaran Islam di Asia Tengah pada Abad kejayaan Islam dan Jalur sutra pada masa itu. Jean A. Berlie membagi tiga *time line* bagaimana Islam masuk ke dalam wilayah Tiongkok. Pembagian waktu pertama dimulai pada abad ke 8-14 M, dimana gelombang ini dinilai merupakan abad kejayaan persebaran Islam dibawah kekaisaran Yizong dan Ming. Gelombang ini merupakan titik terang perdagangan Arab yang pada saat itu mampu menyaingi pedagang dari Portugis di Makau. Pembagian waktu kedua, terjadi di abad ke 17-18 M, dimana gelombang ini ditandai dengan masyarakat Tiongkok pada saat itu mulai mempelajari ilmu Sufisme. Persebaran Islam pada periode waktu ini tidak terlepasnya peran penting Syech Sulaiman dan Master Ma Hualong. Lalu pembagian waktu yang terakhir pada abad ke 19, fase ini memiliki ungkapan *New of Religion* (agama baru) yang di dorong oleh Ma Wanfu (1849-1934). Ajaran Islam yang diperbaharui ini lebih liberal dan fleksibel dimana Ma Wanfu mengkolaborasikan pemahaman Sufi-nya dengan kondisi sosial pada saat itu. Meskipun

demikian, tidak banyak masyarakat yang tertarik dengan paham yang di bawanya. (Berlie, *Islam in China: Hui and Uyghurs Between Modernization and Sinicization*, 2004)

Selain perdagangan, faktor pernikahan juga turut berkontribusi dalam proses penyebaran Islam di wilayah Asia Tengah Melalui perkawinan campur . Hal ini terbukti dari masyarakat Xinjiang kontemporer, yang memiliki kemiripan wajah dengan orang-orang Arab, Turki, Persi, Afganistan, Uzbekistan atau Pakistan (Rusdan, 2017).

**Gambar 2. Potret Wajah Masyarakat Uyghur**



Sumber : (google)

Penyebaran Islam di Xijiang dimulai dari abad ke delapan M dan berkembang pesat penyebarannya pada abad ke 15-16 M. Pada saat itu, agama yang populer diimani di Xinjiang adalah Islam (Iqbal, 2018). Kepercayaan masyarakat Xinjiang sebelumnya, seperti ; Zoroastrianisme, Manichaeisme, dan Nestorianisme, perlahan di tinggalkan setelah masuknya Islam di wilayah ini (Sasongko, 2017). Selama perodesasi ini, pengaruh pemimpin Islam dan keharmonisan antar etnis di Xinjiang masih berlangsung dengan baik. Sampai saat kepemimpinan Dinasti Qing ditahun 1644 hingga 1991, hubungan antara masyarakat Muslim dan pemerintah Cina mengalami masa-masa sulit dan penuh ketegangan. Pemberontakan Muslim pada masa Dinasti Qing terjadi atas protes masuknya migran yang berasal dari wilayah padat penduduk dari Tiongkok ke wilayah Xinjiang. Namun upaya protes masyarakat Muslim

ditindak keras oleh pemimpin Dinasti Qing, yang juga menjadi akhir periode akomodasi panjang masyarakat Muslim di Tiongkok (Larasati, 2020). Dibawah kekuasaan Dinasti Qing, Islam mengalami krisis identitas melalui diskriminasi kebijakan anti Islam yang diimplementasikan Qing. Setelah itu, warga Uyghur tidak tinggal diam menerima tindakan diskriminasi ini-Upaya memberontak tentu tidak dapat dihindari, namun pemerintah menindak tegas pemberontak di wilayah yurisdiksinya. Dinasti Qing tercatat memusnahkan lebih dari dua juta muslim hanya dalam kurun waktu 12 tahun. (Israeli, 2002). Setelah runtuhnya Dinasti Qing pada tahun 1911-1912, umat Islam berhasil mendapatkan hak-hak mereka melalui konstitusi yang diproklamasikan partai Kuomintang yang menjamin kebebasan beragama (Rusdan, 2017). Pada pembahasan selanjutnya, akan berbicara tentang perkembangan konflik diskriminasi Islam di wilayah Xinjiang.

## 2.2 Awal Mula Diskriminasi Etnis Uyghur

Sayangnya, kehidupan yang damai pada masyarakat Uyghur tidak bertahan lama. Setelah Tiongkok berhasil dilegitimasi sebagai negara Komunis di akhir tahun 1940an, upaya pengawasan terhadap Muslim Xinjiang kembali dilakukan. Mereka menghapuskan wakaf yang diwariskan ke masjid dan lembaga keagamaan Islam lainya (Rusdan, 2017). Poster (**Gambar 3**) adalah bentuk upaya pemerintah yang berupaya menggiring opini publik yang terjadi ditahun 1958. Dalam poster tersebut menggambarkan bagaimana persatuan ibu pertiwi, persatuan etnis, dan kepemimpinan partai perlu dilindungi dengan memerangi upaya separatis etnis lokal. Seruan dari pemerintah pusat tersebut menciptakan kebencian secara masal bagi pribumi terhadap etnis minoritas. Didalam poster berikutnya (**Gambar 4**), kita dapat seruan pemerintah tiongkok yang berupaya menggiring opini publik untuk melihat bahwa ancaman sebenarnya adalah separatisme dan ekstrimisme Uyghur. Meskipun Islam dahulunya berkontribusi membangun peradaban di Xinjiang, namun pemerintah Tiongkok tidak berupaya melindungi hak-hak dasar etnis Uyghur sebagai warga negara. Propaganda merupakan instrument yang dipilih pemerintah untuk membenarkan tindakan represif pemerintah terhadap Uyghur. Akibatnya, aktivitas spiritual dan non-spiritual yang mengandung nilai-nilai Islam dilarang, seperti ; Sholat, menumbuhkan jenggot, memutuskan untuk tidak meminum alkohol, memakai jilbab, belajar tentang ajaran Islam, berpuasa, dan bahkan pergi ke masjid. (Meyer, june 2016)



**Gambar 4. Memerangi Uyghur Sebagai Sebuah Ancaman**



Sumber : (Meyer, june 2016)

Pemberontakan adalah manifestasi dari kebencian yang didasari rasa solidaritas sesama rakyat minoritas. Mereka menyaksikan bahwa terjadi diskriminasi terhadap agama Islam, termasuk orang-orang yang beriman kepada Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan penghancuran kaligrafi dan masjid, para pemimpin agama dianiaya dan dipersekusi, serta penganutnya juga dipersekusi (Davis, 19 November 2014). Pemerintah secara tegas menolak ajaran budaya yang bertentangan dengan budaya asli Tiongkok yaitu ajaran Islam. Meskipun

secara hukum konstitusi pemerintahan Tiongkok mengadopsi prinsip Egaliter dan Akomodasionis, bahkan kebijakan tidak tertulis justru mengasimilasi minoritas Uyghur secara paksa. Melalui Bahasa resmi Tiongkok (Putonghua), Uyghur dipaksa untuk menerapkan bahasa ini disemua sektor kehidupannya, dimana Bahasa asli Uyghur adalah *Lingua Franca* dan berbentuk aksara Arab (Damhuri, 2019). Namun, yang menjadi permasalahan utama adalah upaya penghapusan identitas asli Uyghur yang diwajibkan meninggalkan bahasa *Lingua Franca* dan larangan tulisan mengandung unsur etnis Uyghur didalamnya.

Perpecahan antara pemerintah Tiongkok dan masyarakat minoritas Muslim pertama terjadi pada Maret 1931. Moment ini dikenang dengan “*Kumul Rebellion*”. Gerakan ini pertama kali muncul akibat keresahan rakyat terhadap kekuasaan turun-menurun (*Monarchy*), serta adanya keinginan untuk melembagakan pemerintah terpusat (*Liberalize*). Adapun selogan yang terkenal pada perodesasi ini yaitu “Turkistan merupakan tanah kelahiran orang-orang Turki dan secara alamiah harus menjadi tanah Turki” “Orang-orang Cina Han yang sudah merusak tanah ini sedari dulu, harus mengembalikan kepada pemilik lama.” Kerusuhan Kumul dapat diakhiri dengan perjanjian yang dicapai oleh Hoja Niyaz (Presiden Republik Islam Turkestan Timur) bersama pemerintah provinsi Xinjiang pada Mei 1934. (Ke, 2018). Namun upaya ini hanya berlangsung satu tahun, kemudian pasukan ini musnah diserang pasukan Hui dari divisi 36 Tentara Merah Tiongkok, yang tunduk kepada Mao Tse Tung. Mereka menggunakan pasukan muslim Hui untuk melawan separatis dan sisa sisa pemberontak yang kabur ke wilayah pegunungan. (CNN, Jejak Konflik Etnis Uighur dan Pemerintah China, 2018)

Menurut rencana “Pembangunan Barat Laut” yang diresmikan pada tahun 1942, Pemerintah Kuomintang mengusulkan subsidi 10.000 pejabat dan keluarga mereka untuk bermigrasi ke Xinjiang. Menurut sebuah laporan oleh Kuomintang pada tahun 1943 mengklaim setidaknya ada satu juta pengungsi Tiongkok tinggal dan bekerja di Xinjiang (Total populasi wilayah ini kurang dari empat juta pada saat itu), dan pemerintah mulai aktif mempromosikan penjajahan pada saat itu. (Millward, 2007)

Upaya memerdekakan diri kedua terjadi pada musim panas 1944, moment ini dikenal sebagai “*November Revolution*”. Meskipun terjadi di tiga wilayah yang berbeda dan masing-masing mengenal dengan sebutan yang berbeda, namun tetap satu tujuan yang sama yaitu *National Revolution*. Gerakan ini dipimpin oleh Ahmatjan Kasimi, dimana perjuangan mereka didasari atas pembebasan kelas sosial yang dikuasai etnis Han Tiongkok. (Ke, 2018). Serangan

berlangsung selama tujuh hari, dimulai tanggal tujuh november 1944 dan tanggal 14 November pasukan pemberontak berhasil menguasai wilayah. Tercatat 200 mayat dimutilasi di sumur markas besar polisi Kuomintang. Kelompok ini memiliki nama Millo Azadlik Taxkilati yang secara rahasia dibentuk oleh Muslim Turki asli Xinjiang untuk berupaya bersama memerdekakan diri (Millward, 2007)

Ketika upaya Kuomintang untuk merebut kembali wilayah Ghulja di musim dingin, pasukan militer ETR (*East Turkestan Republic*) berhasil mendorong pasukan Kuomintang mundur, melalui serangan udara yang diluncurkan, pasukan Kuomintang kalah dalam pertempuran di Wusu dan Jianghe. Tercatat di tahun 1945, ETR telah menguasai Xinjiang utara, yang terdiri atas : kota Aqsu, dan Kirghiz. (Millward, 2007) Keberhasilan Kelompok Yili (Kelompok militer yang di bangun oleh Unisoviet) melawan pemerintahan Kuomintang tidak luput dari dukungan Uni Soviet pada saat itu. Banyak orang-orang etnis Uyghur melarikan diri untuk dilatih dan dipersenjatai untuk melawan rezim pemerintahan Kuomintang. Pada 14 Agustus 1945, hubungan antara Unisoviet dan Pemerintah Tiongkok membaik, di buktikan dengan penandatanganan *Treaty of Friendship and Alliance*. Kekalahan partai Nasionalis Tiongkok ditahun 1949 menjadikan wilayah yang dikuasi ETR Kembali dalam kontrol Tiongkok. Melalui diplomasi pemerintah Tiongkok dengan ETR, mereka mencapai kesepakatan bersama dimana ETR tidak akan berkerjasama dengan Unisoviet dan melawan pemerintah Tiongkok. (Millward, 2007).

Atas upaya perlawanan etnis minoritas Uyghur yang ingin melepaskan diri dari rezim Tiongkok, tentu kita bertanya mengapa hal ini terjadi ? Untuk itu, dalam pembahasan selanjutnya akan dijelaskan mengapa adanya upaya etnis Uyghur yang ingin melepaskan diri dan melawan pemerintahan Tiongkok.

### **2.3 Latar Belakang Upaya Uyghur Melepaskan Diri Dari Pemerintah Tiongkok**

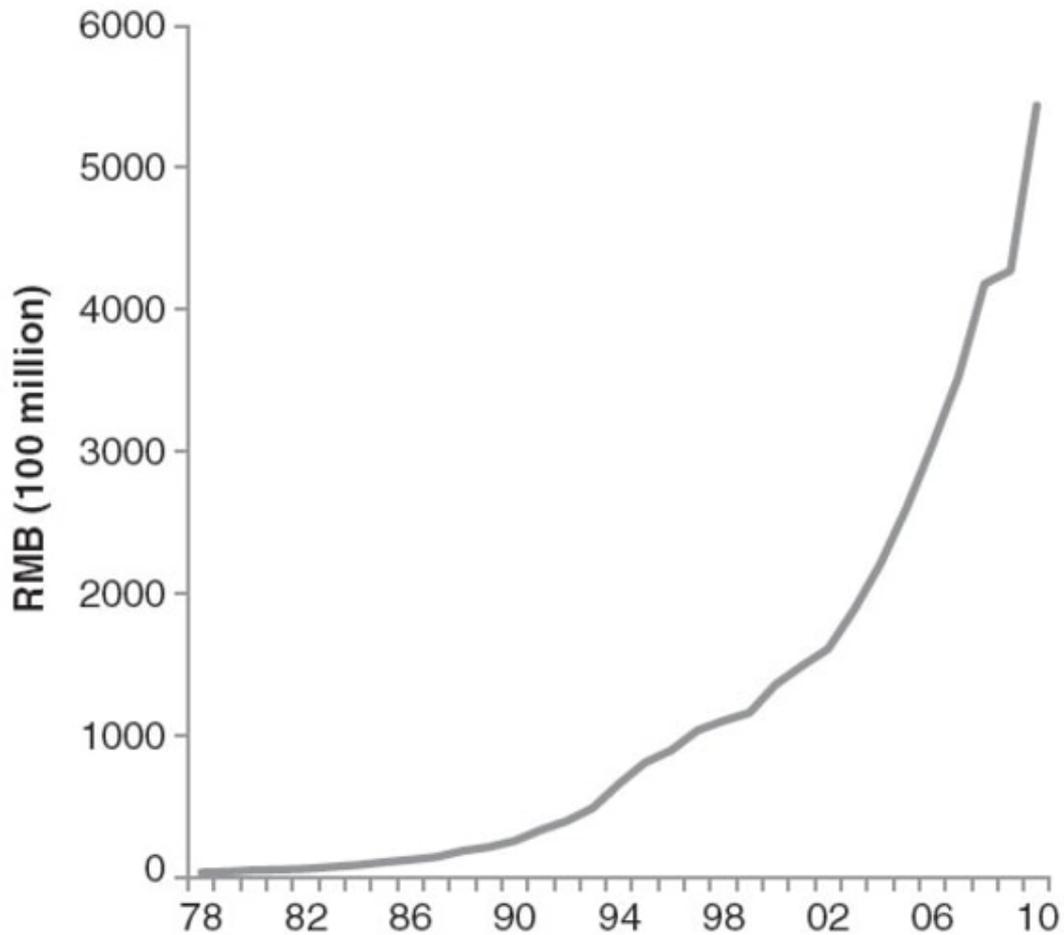
Wilayah Xinjiang memiliki kemiripan dengan wilayah persebaran Islam di sekitarnya, dimana kaya akan minyak dan batu bara. Pemerintah Tiongkok meilihat sebuah potensi bagi kepentingan nasional dalam faktor pendukung Tiongkok untuk mengimbangi negara *Super Power* yaitu Amerika Serikat. Sumber energi ini perlu menjadi instrument sebagai pendukung kesuksesannya. Produksi minyak Tiongkok terus meningkat seiring dengan laju pesat industrialisasinya (Wardhani, 2011). Untuk mengimbangi kekuatan produksi industri dalam

negri, Tiongkok juga perlu memperkuat sumber energi seperti minyak bumi. Untuk itu, wilayah Xinjiang perlu untuk dikuasai secara teritori dan sumber daya alamnya (SDA).

Meskipun wilayah ini berbasis Pedesaan, namun Xinjiang memiliki potensi ekonomi yang besar dikarenakan sumber daya alamnya (SDA). Menurut Zainab Raza, bahwa Xinjiang mengandung sepertiga dari minyak Tiongkok, dan berpotensi besar untuk industri gas, mineral, dan uranium. Zainab Raza juga mengatakan, pihak Tiongkok dapat melakukan diversifikasi perusahaan migas nasional melalui jalur suplai dan impor. Hal ini terbukti dari 60% produk regional bruto Xinjiang berasal dari industri mineral, meskipun keuntungan industri ini dikendalikan oleh Etnis Han. (Raza, 24 October 2019). Adapun komoditi pertanian di Xinjiang yaitu ; katun, lavender, dan buah hop. (Amy H. Liu and Kevin Peters, 2017). Seperti yang kita ketahui, Tiongkok merupakan salah satu penghasil katun dan textile terbaik didunia.

Pada 17 Juni 1999, Presiden Jiang Zemin meresmikan kebijakan GLW (*Great Leap West*) atau pembangunan besar-besaran di barat, pemerintah Tiongkok berambisi untuk meningkatkan ekonomi Tiongkok di wilayah barat yaitu kawasan Xinjiang. Adapun tujuan dari kebijakan ini adalah berupaya meningkatkan kesejahteraan dan taraf ekonomi dalam menekan ketegangan etnis didalamnya. Melalui strategi ini, pembangunan seperti infrastruktur dibangun secara progresif. Kebijakan pemerintah ini, dinilai berhasil dan dapat dilihat (**grafik 1.**) setiap tahunnya melalui peningkatan GDP Xinjiang yang terus membaik. (Amy H. Liu and Kevin Peters, 2017)

**Grafik 1. Pertumbuhan GDP Xinjiang 1979-2010**



Sumber : (Amy H. Liu and Kevin Peters, 2017, p. 268)

Pemerintah Tiongkok aktif mempromosikan wilayah Xinjiang sebagai wilayah yang kaya akan peluang kerja. Alhasil, banyak warga bersuku Han (pribumi) bermigrasi ke wilayah ini untuk mendapatkan pekerjaan dibidang industri gas dan mineral. Migrasi Han ke Xinjiang mencapai puncaknya pada periode tahun 1960-1964 yang mewakili 8,65 persen dari total aliran antar provinsi di Tiongkok. (Zai Liang dan Michael J. White, 1996). Meskipun tingkat migrasi ke Xinjiang menurun pada tahun 1970-an, selama periode 1953-1983 secara garis besar, Xinjiang masih menduduki peringkat kedua setelah Heilongjiang sebagai wilayah tujuan yang diminati bagi para migran antar provinsi (Yuan Q.-l. , 1990). Namun hal ini juga tentu membawa pengaruh besar untuk stabilitas persaingan di pasar ketenagakerjaan.

**Table 1. Persentase jumlah suku diwilayah Xinjiang periode 1945-2008**

	1945	1982	1996	2008
Total (Juta)	3.6	13.1	16.8	21.3
Han (Persen)	6.2	40.3	41.1	39.2
Uyghur (Persen)	82.7	45.7	50.6	46.1
Hui (Persen)	2.8	4.3	4.9	4.5
Kazakh (persen)	1.1	6.9	8.0	7.1
Other (Persen)	7.2	2.8	2.8	3.1

Sumber : (Anthony Howell & C. Cindy Fan, 15 May 2013)

Disusun oleh penulis

Meskipun industri ini membuka lapangan pekerjaan dan membawa kemakmuran ekonomi bagi Tiongkok, namun etnis Uyghur sulit mendapatkan kesetaraan sosial. Dengan angka migrasi yang cukup signifikan menurut **table 1**, kedatangan Han kewilayah ini mempersulit keadaan Uyghur. Mereka dipersulit untuk melamar pekerjaan di wilayahnya sendiri. Alhasil menciptakan kecemburuan bagi etnis Uyghur kepada Han. Menurut Zainab Raza , “Untuk menciptakan market yang efisien harus mengorbankan kesetaraan” dengan kata lain hal ini merupakan *Ethnic Penalty*. (Raza, 24 october 2019). Kemakmuran yang didapatkan di wilayah Xinjiang dinilai hanya dinikmati oleh etnis Han saja. Penduduk asli wilayah ini justru harus berupaya lebih keras menghadapi persaingan dengan pendatang yang mayoritas etnis Han.

Kesetaraan etnis merupakan hal yang fundamental dalam menjaga keharmonisan negara. Didalam tulisannya, Colin Mackerras mengatakan bahwa dalam riset lapangannya, banyak orang orang Uyghur mengeluh karna adanya hak istimewa yang didapatkan etnis Han Tiongkok yang mendominasi pasar ketenaga kerjaan. (Mackerras, 2010). Dalam wawancara yang di lakukan X. Zang, seorang wanita Uyghur mengatakan bahwa dia telah berupaya mendapatkan pekerjaan untuk anaknya dengan menggunakan pihak ketiga, namun setelah di wawancara “Boss Han menyuruh anak saya untuk pergi , karna dia tidak mau mempekerjakan orang minoritas” (Zang, 2011). Rebiya Kadeer merupakan seorang wanita yang sukses dalam bidang bisnis perusahaan. Namun sayangnya pada pertengahan Maret 2000, dia di tangkap dan di tahan atas tuduhan mengancam keamanan nasional. Rebiya Kadeer lahir dari keluarga

sederhana yang pada akhirnya bisa mencapai kesuksesan di rezim *Statemonopolies*. (Mackerras, 2010). Akibat ketimpangan dan diskriminasi sosial dan ekonomi yang terkonstruksi di wilayah ini, banyak anak-anak muda Uyghur termotivasi untuk meninggalkan wilayah Xinjiang dan mencari pekerjaan baru di wilayah di belahaan lain Tiongkok. Akan tetapi usaha mereka untuk bermigrasi juga tidak mendapatkan titik terang yang lebih baik, karena umumnya kaum wanita yang bermigrasi ke luar wilayah Tiongkok, hanya menjadi budak dan jenis pekerjaan lain yang tidak jauh lebih baik dari sebelumnya. (Karisma)

Ketika etnis Uyghur sulit mendapatkan pekerjaan, yang di sebabkan karena adanya stigma bahwa etnis Uyghur lebih tertinggal secara pendidikan formal. Namun dilain sisi, Pemerintah Tiongkok memaksa agar masyarakat Uyghur untuk masuk kedalam bagian Tiongkok dengan cara memasukan kurikulum bahasa Mandarin. Walaupun tidak semua kalangan Uyghur menolak hal ini, namun di ranah pendidikan etnis Han menganggap Muslim sebagai minoritas, lalu dianggap tidak berpendidikan serta lebih tertinggal dari etnis Han. Dengan kata lain etnis Han menciptakan konstruksi sosial bahwa Muslim tidak pantas mendapatkan kesetaraan yang sebanding dengan etnis Han. Akibatnya, secara psikologis masyarakat etnis Uyghur banyak menolak pendidikan budaya dan bahasa asli Tiongkok. (Postiglione, 1999) . Hal ini juga membuat persaingan antara etnis Uyghur dan Han di level pendidikan terhambat karena bahasa yang disebabkan tekanan psikologis. Etnis Uyghur juga tentu mendapat dampak ketertinggalan Pendidikan di banding etnis mayoritas Han.

**Table.2 Tingkat Pendidikan (Umur 15 tahun keatas)**

Etnis	Sekolah menengah	Sekolah Tinggi	Kuliah atau Magister
Uyghur	33.0 %	6.9 %	3.1 %
Han	30.0 %	9.6 %	3.8 %

Disusun oleh penulis

Sumber : (Yuan W. , 2006)

Angka Pendidikan yang rendah menurut data **table 2.** di kalangan Uyghur didasari oleh tingkat ekonomi yang rendah. Ketidakmampuan orang-orang Uyghur dalam membiayai anaknya sekolah dipendidikan yang lebih baik, memperburuk kondisi di pasar ketenagakerjaan. Mayoritas pekerjaan etnis Uyghur adalah petani dan secara umum mendapatkan upah dari orang Han. ( E. Hannum and Yu Xie, 1998). Semenjak Tiongkok meningkatkan ekonomi dikawasan Xinjiang, melalui kebijakan penjaminan menggunakan bahasa *Lingua franca* (Bahasa etnis Uyghur) dan kebijakan membantu masyarakat minoritas mendapatkan Pendidikan. Dinilai telah berhasil meningkatkan angka Uyghur yang bersekolah. Meskipun demikian, masih banyak keluhan yang terjadi dikalangan Uyghur, seperti ; uang kuliah yang terlalu tinggi, kebijakan bahasa yang dinilai belum mapan, dan upaya peningkatan pendidikan diperguruan tinggi tidak menjamin masyarakat Uyghur mendapatkan pekerjaan yang layak. (Grose, 2010). Alhasil, upaya pemerintah dinilai belum efektif untuk menyelesaikan persaingan antar etnis dalam bidang pendidikan.

Dari tahun 1940-1990an, konflik yang berkembang diwilayah ini sesungguhnya hanya konflik rasial antara dua etnis. Berdasarkan sejarah, konflik ini di picu ketimpangan ekonomi yang didominasi etnis Han. Kemiskinan dan kecemburuan yang diperburuk ketidakadilan dari pemerintah Tiongkok terhadap etnis minoritas. (Karisma, p. 46). Kebencian antara etnis

Uyghur dan Pemerintah terus berkembang hingga saat ini. Pemerintah Tiongkok terus menekan upaya pembebasan diri dan ruang gerak etnis Uyghur. Pada 5 juli 2009, terjadi protes damai oleh etnis Uyghur , yang menuntut investigasi terhadap 2 orang migran Uyghur yang di bunuh oleh pekerja Han di sebuah pabrik minan di Shaoguan. Kemudian protes itu berubah menjadi kekerasan yang menyebabkan kematian sebanyak 197 orang dan 1.600 luka-luka. Atas Tindakan represif Tiongkok yang merespon demonstran Uyghur, banyak juga respon negatif diberikan oleh masyarakat internasional. Namun, Pemerintah Tiongkok bersikeras bahwa protes yang terjadi telah diatur sejumlah kecil separatis XUAR. (Rayila)

Setelah tragedi pemberontakan Baren pada April 1990, pemerintah Tiongkok makin mempersempit ruang kebebasan bagi etnis Uyghur. Hal-hal seperti media , novel, publikasi buku, musik, radio, sensor terhadap buku dan publikasi akademik semakin diperketat. Pemberedelan dilakukan untuk menghapuskan hal-hal berkaitan dengan budaya, sejarah, dan yang utama politik Uyghur. Setelah itu, Pemerintah juga menutup akses keagamaan bagi etnis Uyghur, dimana pemerintah menutup banyak masjid dan madrasah, melarang ribuan Imam (pemimpin agama) dan menyeleksi mereka, serta aktivitas keagamaan. (Damhuri, 2019)

Pasca tragedy 9/11, pemerintah Tiongkok dengan tegas menyatakan “perang melawan terorisme global”. Dengan itu, Pemerintah Tiongkok dapat memperluas ruang gerak aksinya dalam menindak Uyghur. Polisi Tiongkok dapat memeriksa dan menangkap orang-orang Uyghur kapan saja dan menindak mereka seperti seorang kriminal tanpa adanya rasa kemanusiaan. Seorang wanita Uyghur bernama guli mengatakan : “ Begitu kami ingin mengatakan sesuatu dalam bentuk protes atas perlakuan yang tidak adil, mereka akan menuduh kami melakukan ‘Separatisme’ atau kejahatan lain yang terkait dengan politik” (Rayila)

Nicholas Bequelin selaku Direktur Regional di Amnesty Internasional memaparkan 8 point keresahan, yang di rangkum dalam wawancara di 400 orang Uyghur yang mengungsi keluar negeri, yang mana telah melampaui nilai-nilai HAM. 8 point tersebut adalah ;

- (1) kamp interniran massal (*Re-education Camp*)
- (2) Perlakuan yang tidak manusiawi untuk tahanan Uyghur
- (3) Hukuman yang berlebihan
- (4) Pemblokiran informasi
- (5) Program antiterror Tiongkok
- (6) Ditangkap karna menumbuhkan jenggot

(7) Pengawasan massal

(8) Ancaman berbicara (Saputra, 2019)

Didalam kamp re-edukasi , Pemerintah Tiongkok telah menahan sekitar satu juta orang Uyghur. kamp tersebut bertujuan untuk menghilangkan identitas asli yang dimiliki Uyghur. Para aktivis mengatakan bahwa Tiongkok berusaha menghilangkan budaya muslim Uyghur dengan memaksa mereka memakan babi dan meminum alkohol. Penyelidikan pihak BBC juga mengatakan bahwa perempuan Uyghur dipaksa menggunakan alat kontrasepsi untuk menekan angka kelahiran dan warga Uyghur yang didalam kamp digunakan sebagai tenaga kerja paksa (BBC, 2021). Penangkapan etnis Uyghur untuk dimasukkan di kamp pendidikan ulang diketahui tanpa adanya proses peradilan. Pemerintah Tiongkok menggunakan kata " Kamp Pendidikan Ulang" untuk menangkak kritik internasional. Padahal, kamp pendidikan ulang sama halnya penjara bagi etnis Uyghur (Sudworth, 2018).

Setelah diskriminasi ekonomi dan ketimpangan etnis, isu kontemporer yang berkembang adalah diskriminasi agama yang terjadi bagi umat muslim etnis Uyghur. Pihak kepolisian pemerintah Tiongkok menangkap orang-orang Uyghur dengan alasan menumbuhkan jenggot dan seseorang yang telah mengunduh video berunsur keagamaan enam tahun silam (Conrad, 2020). Larangan untuk solat di Masjid bagi anak di usia dibawah 18 tahun, yang berlaku di setiap bulan Ramadhan yang berlangsung setiap tahun. Peraturan yang di sebut “namaz” telah di sahkan pemerintah sejak 2017 silam. (Nurfajriani, 2020) Pemerintah Tiongkok juga melarang pelaksanaan ibadah pada tempat umum dan area publik. Hal ini membuat pelaksanaan ibadah lima waktu bagi umat Islam dipersulit. Menurut Muhiddin sebagai perwakilan organisasi masyarakat Islam Indonesia yang berkunjung ke Xinjiang, “Ruang Publik disana tidak boleh terkontaminasi dengan aspek keagamaan” (Lubis, 2019)

Arab Saudi merupakan tempat penyebaran agama Islam pertama di Dunia. Arab Saudi dengan warisan budaya Islam yang paling besar, menjadi tempat impian terakhir bagi umat Muslim di dunia untuk menyempurnakan ibadahnya. Dipembahasan selanjutnya akan di jelaskan bagaimana relasi antara bangsa Arab, Uyghur dan Tiongkok bisa terbentuk dan membangun peradaban di Xinjiang.

## 2.4 Hubungan Antara Arab, Uyghur, dan Tiongkok

Jalur sutra merupakan jembatan yang menghubungkan budaya Arab ke Tiongkok. Pada masa itu, banyak pedagang Arab yang datang hanya untuk berdagang ataupun menetap di wilayah tujuannya, termasuk wilayah Xinjiang. melalui jalan yang vital diselatan (Nan Lu), kuda-kuda pedagang Arab beriringan keledai dan kuda membawa barang dagangannya seperti *Damask* (jenis pedang yang terkenal buatan Damaskus), dan barang komoditi seperti Kurma, Yakut, Zabarjad, Gading, Kurma, Kismis, Zamrud, Berlian, dan lainnya. Lalu barang tersebut ditukarkan dengan barang dagangan dari pedagang Tiongkok. adapun beberapa tradisi kuno dari hubungan antara bangsa Arab dan Tiongkok ini masih melekat kedalam tradisi dua bangsa kontemporer. Hal ini dapat dilihat dalam proses tradisi pernikahan di wilayah Arab. Dimana, akan dinilai kurang lengkap jika didalam antarannya (Barang yang diberikan pengantin laki-laki) tidak terdapat porselin buatan negeri tirai bambu yang asli. (Ma, 1979)

Penyebaran agama Islam membawa nilai-nilai yang kuat terhadap budaya Arab Saudi kepada wilayah persebarannya. Wilayah oasis di Lembah Tarim dan Junggarian, secara bertahap menjadi dominan pada abad ke-10 dan ke-15, yaitu terjadi pada saat Islam menyebar ke wilayah timur di wilayah tersebut. Peradaban Persia juga mengadopsi nilai-nilai bangsa Arab yang dibawa dalam proses penyebarannya, lalu peradaban Turki Asia memodifikasi Bahasa Arab didalam kehidupan sosial mereka. Ortografi ini masih populer dan melekat di wilayah ini. (Dwyer, 2005)

Aksara Arab memang sangat dekat kaitannya bagi umat muslim. Instrument arsitektur tempat ibadah, kebanyakan mengadopsi aksara Arab. Begitupun masyarakat Uyghur yang mayoritas Muslim, sangat gemar menggunakan bahasa Arab di kehidupan sosialnya. Adapun alasan orang-orang Uyghur tetap mempertahankan Bahasa Arab, menurut Dwyer A.M yaitu: Keperaktisannya, Estetika, dan Identitas Kelompok. (Ibid)

Meski demikian, pemerintah Tiongkok melihat permasalahan ortografi merupakan hal yang krusial. Pada saat terjadi revolusi budaya, Tiongkok menghilangkan jejak fisik seperti buku dan manuskrip yang mengandung ortografi Arab. Serta dilakukannya edukasi Bahasa Mandarin khususnya anak-anak di sekolah dari tahun 1950 sampai 1976. Bahasa Arab

Kembali digunakan didalam kehidupan sosial Uyghur di tahun 1980-an, moment ini berkaitan dengan adanya pelanggaran kebijakan dari pemerintah Tiongkok pusat terhadap kebijakan bahasa dan agama minoritas. (Ibid)

Seiring bergantinya waktu, hubungan antara Arab Saudi dan Tiongkok diwarnai keharmonisan. Pada tahun 2017, Hera F. Haryn, seorang reporter CNN Indonesia mengatakan bahwa Tiongkok sebelumnya merupakan negara industri yang hanya fokus dalam bidang manufaktur. Namun demikian, harus ada peningkatan bagi Tiongkok untuk menyeibangi kekuatan itu. Oleh sebab itu , Tiongkok juga akan menjadi Negara Konsumsi. Kendati demikian, Tiongkok pada saat itu akan mengalami perlambatan ekonomi namun di sisi lain *Cash* yang dimiliki Tiongkok tetap Tinggi. Sesuai dengan visi Saudi 2030 untuk menjual Aramco dibursa saham, Tiongkok dirasa tepat untuk menjadi patner bagi Saudi untuk menciptakan hubungan bilateral dalam bidang ekonomi. Lalu alasan kedua terjalinnya hubungan antara Saudi dan Tiongkok yaitu karena jumlah penduduk tertinggi didunia ada diwilayah Tiongkok. Alasan Tiongkok juga mau untuk menandatangani Kerjasama ini, karena Tiongkok adalah negara industri yang dimana tentu melihat Kerjasama energi ini mampu menekan fluktuasi harga minyak dunia demi kepentingan energinya. Oleh karna itu kedua negara mencapai kesepakatan atau *Megadeal* sebesar \$ 65 Miliar investasi Saudi untuk Tiongkok. (Haryn, 2017)

*“Kerja sama Arab-China meningkat dalam kekuatan dan keragaman setiap harinya. Ini adalah kerja sama yang didasarkan pada rasa saling menghormati prinsip-prinsip hukum dan norma internasional; kedaulatan dan kemerdekaan negara, komitmen untuk resolusi damai dari konflik, dan keinginan bersama memperdalam serta memperkuat bidang kerja sama guna mewujudkan kepentingan masyarakat Arab dan Tiongkok”* Kata Menteri Luar Negri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan pada 7 juni 2020. (Syahrianto, 2020)

Pada 23 Maret 2021, Wang yi (Menteri Luar Negri Tiongkok) bertemu dengan Faisal Bin Farhan Al Saud di Riyadh. Wang Yi menyatakan bahwa Tiongkok mendukung penuh atas Tindakan Saudi dalam menjaga Kedaulatan, keamanan, dan stabilitas. Dengan memilih jalur pembangunan yang seusai dengan situasi nasionalnya. Dukungan Tiongkok juga di berikan untuk peran yang lebih besar dalam urusan regional dan global, meskipun tidak mencapuri urusan nilai dan ideologi Arab Saudi. Dukungan yang konsisten untuk Tiongkok juga diberikan pihak Saudi didalam urusan rumah tangga Tiongkok, seperti kecaman negara negara barat atas

Tindakan Tiongkok di Xinjiang. Menurut pihak Saudi hal tersebut merupakan kebohongan yang di buat-buat. Mendukung Tiongkok berarti mendukung tujuan dan prinsip Piagam PBB serta keadilan internasional. (FMPRC, 2021)

## 2.5 Kesimpulan

Dengan adanya perdagangan antara negeri Arab dan Tiongkok pada masa lampau, persebaran nilai budaya juga ikut terbawa. Pada masa lampau, Xinjiang yang mayoritas masyarakatnya adalah ‘orang-orang Turki’, sempat dipimpin oleh Panglima perang Uzbek yaitu Yakub Beg, yang berupaya keras melawan Dinasti Qing. Ditahun 1874, wilayah ini dikuasai penuh oleh Dinasti Qing dan diberinama Xinjiang yang memiliki arti “Batasan Baru” (CNN, Jejak Konflik Etnis Uighur dan Pemerintah China, 2018)

Secara Historis, wilayah Xinjiang bukan tanah asli Tiongkok. Tanah tersebut milik orang Turki. Etnis asli wilayah ini adalah orang-orang Kazaks Uighur, Kirgiz, Tatar dan Uzbek. Upaya etnis Tiongkok merebut wilayah ini telah berlangsung cukup lama. Invasi di lakukan sejak dari abad 104 SM, 59SM, 73 dan 448, 657 dan 774. Pada 1884, dibawah Dinasti Qing, Xinjiang masuk kedalam wilayah otonom etnis Tiongkok. (Wardhani, 2011)

Hubungan Arab Saudi dan Tiongkok sudah terjalin sejak peradaban abad ke lima M. Pedagang Saudi dengan barang dagangannya, melakukan perjalanan hingga negeri tirai bambu yaitu Tiongkok. Dengan begitu, terjadi pertukaran budaya antara kedua negara yang terjadi secara organik dan banyak penduduk muslim diwilayah Tiongkok yang terkait hubungan budaya dengan masyarakat Saudi.

Meskipun Ideologi kedua negara berbeda, namun hubungan bilateral kedua negara terjalin kuat saat ini. Dengan kerja sama bilateral, mereka berupaya mewujudkan visi masing-masing yaitu Saudi Vision 2030 dan OBOR (*Belt and Road Initiative*). Oleh sebab itu, mereka membangun hubungan yang kuat dan saling membahu. Namun dilain sisi, Arab mendukung Tindakan represif dan diskriminatif Tiongkok terhadap Uyghur, Meskipun Arab dan masyarakat Uyghur memiliki persamaan Identitas.